KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Tindak tegas dong para produsennya
Tanggal : Jumat, 07 Juli 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Marak Obat Ilegal Berbahaya

Tindak Tegas Dong Para Produsennya



Rahmad Handoyo

ANGGOTA Komisi IX DPR Rahmad Handoyo terkejut dengan rilis terbaru Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang obat tradisional ilegal yang membanjiri pasaran. Terlebih, obat tanpa izin edar itu diduga mengandung bahan kimia berbahaya bagi organ tubuh, terutama ginjal dan hati.

Handoyo menuturkan, menjadi tugas BPOM memastikan obat tradisional maupun makanan yang beredar di masyarakat aman dan layak dikonsumsi. Langkah badan pengawas obat merilis daftar obat tradisional ilegal yang berbahaya tersebut sudah tepat.

"Sebagai pengawas, BPOM memang harus memberi peringatan kepada masyarakat tentang obat-obat tradisional ilegal dengan cara menyampaikan rilis daftar obat ilegal secara periodik," jelasnya.

Dia mengingatkan, produk jamu dan kosmetik ilegal tersebut kerap mencantumkan label BPOM, termasuk izin edar dalam kemasannya. Namun setelah dicek, ternyata palsu.

"Artinya izin BPOM tersebut palsu, namun masyarakat banyak yang tidak mengerti," katanya.

Untuk melindungi masyarakat dari obat palsu tersebut, Handoyo meminta BPOM harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. "Kita harus waspada dan edukasi adalah kata kuncinya," katanya.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini meminta pemerintah daerah hingga tingkat desa, kelurahan, RT dan RW dilibatkan dalam sosialisasi ke masyarakat. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya obat tradisional ilegal tidak cukup hanya mengandalkan rilis BPOM.

"Masyarakat harus diedukasi bagaimana cara memilih jamu dan makanan yang sehat, bagaimana bisa membedakan obat yang legal dan ilegal," tegasnya.

Dan tidak kalah penting dari itu, sambung Handoyo, harus ada tindakan tegas kepada para produsen obat palsu tersebut. Selama ini, banyak kasus yang proses hukumnya tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera. Ada yang dipidana, tapi hukumannya sangat ringan. "Saya kira salah satu solusinya adalah penindakan yang keras. Hukum berat biar ada efek jera," tegasnya lagi.

Handoyo mengaku sering mendapati sebuah produk yang tidak jelas siapa produsennya. Sehingga begitu ditemukan masalah, tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab. "Ada nama perusahaannya. Ada alamatnya. Tapi setelah dicek tempatnya tidak ada. Begitulah, namanya juga ilegal," ungkapnya.

Karena itu, dia mendorong agar BPOM bersama aparat kepolisian bersinergi dalam mengungkap kasus obat ilegal berbahaya.

"Selama BPOM tidak kuat dalam penindakan, maka berbagai kasus zat berbahaya akan masih sering muncul di masyarakat," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, BPOM merilis daftar obat tradisional ilegal beredar yang berbahaya bagi organ tubuh. BPOM mengungkap, sepanjang 2022 ini, setidaknya terdapat 777 kasus obat tradisional yang tidak memiliki izin edar hingga mengandung bahan kimia obat (BKO).

"Jika tetap dikonsumsi, efek pemberian BKO pada obat tradisional bisa membahayakan ginjal dan hati. Setiap produk obat tradisional tanpa izin edar BPOM juga tidak terjamin manfaat, khasiat, hingga mutunya," kata Kepala BPOM Penny Lukito. ■ KAL